

THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND THE ROLE OF INTERNAL AUDIT ON THE PREVENTION OF FRAUD BY INTERNAL CONTROL AS INTERVENING VARIABLES**Monica¹, Nasrizal², Rasuli³**^{1,2,&3}Universitas Riau

Email: ica.monica89@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of organizational culture and the role of internal audit on prevention with internal control as an intervention variable. at the Regional Apparatus Organization of Riau Province. The population in this study were 40 (forty) Regional Apparatus Organizations in the Riau Provincial Government, which consisted of: 1 (one) Regional Secretariat, 1 (one) DPRD Secretariat, 1 (one) Inspectorate, 1 (one) Civil Service Police Unit, 3 (three) hospitals, 9 (six) agencies and 24 (twenty four) offices. The sample in this study is the Regional Apparatus Organization that has been audited in the Riau Provincial Government. From each OPD, 3 (three) respondents will be taken so that a sample of 105 people is obtained. The type of data used in this study is primary data obtained from questionnaires. The data analysis tool in this study was carried out with Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) using SmartPLS version 3.2 software. The results show that culture has an effect on fraud prevention, internal audit has no effect on fraud prevention, organizational culture has an effect on internal control, internal audit has an effect on internal control, internal control has an effect on prevention, organizational culture has an effect on prevention through internal control, and internal audit effect on prevention prevention through internal control

Keywords: organizational culture; internal audit; fraud prevention; internal control

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengaruh budaya organisasi dan peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening.pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah 40 (empat puluh) Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Riau, yang terdiri dari: 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 3 (tiga) Rumah Sakit, 9 (sembilan) Badan dan 24 (dua puluh empat) Dinas. Sampel dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang sudah diaudit di Pemerintah Provinsi Riau, Dari setiap OPD akan diambil 3 (tiga) responden sehingga diperoleh sampel sebanyak 105 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Alat analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kcurangan, budaya organisasi berpengaruh terhadap pengendalian internal, peran audit internal berpengaruh terhadap pengendalian internal, pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui pengendalian internal, dan peranaudit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui pengendalian internal

Kata Kunci: budaya organisasi; audit internal; pencegahan kecurangan; pengendalian internal

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintahan yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Praktik korupsi banyak dijumpai di Negara berkembang. Karena secara umum Negara tersebut belum menegakkan aturan hukum secara baik. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dengan tingkat korupsi yang tinggi. “Menurut CPI (*Corruption Perception Index*) Indonesia pada Tahun 2020, Indonesia berada diskor 37 dan berada diperingkat 102 dan Skor ini turun 3 poin dari Tahun 2019 lalu” (Suyatmiko, 2020).

Kecurangandalam pengelolaan keuangan pada Pemerintahan Daerah sering terjadi di Indonesia, dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang sudah melibatkan beberapa aparat pada Pemerintahan Daerah, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemprov Riau kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun 2020. Namun menurut ICW, opini WTP dari BPK tidak dapat dijadikan patokan untuk menyatakan suatu daerah bebas dari korupsi. Opini tersebut hanya sebagai patokan untuk melihat kepatutan dan kewajaran dari segi peraturan yang berlaku, khususnya dalam hal laporan keuangan suatu daerah.

Dampak dari maraknya kasus korupsi yang terjadi sangat merugikan masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena dapat membuat daerah mengalami kerugian dari segi keuangan yang dapat menghambat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menghambat pembangunan. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi perlu dilakukannya upaya pencegahan agar peluang terjadinya kecurangan akan semakin kecil (Wahyuni dan Nova: 2018).

Menurut Karyono (2013), pencegahan kecurangan adalah merupakan segala daya dan upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan. Peran utama pencegahan kecurangan terletak pada pimpinan organisasi baik pada pimpinan tertinggi maupun pada setiap lini organisasi. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan tersebut. Dan bila kecurangan sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini (Fitrawansyah, 2014).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, berbagai kecurangan juga terjadi pada Pemerintahan Provinsi Riau diantaranya: KPK pernah menangkap tiga Gubernur Riau secara beruntun, mulai dari Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun. Pada awal tahun 2018 tiga orang Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita ditetapkan sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi di Badan Pendapatan Daerah Pemprov Riau (Bapenda). Kejati Riau menemukan kerugian Negara Rp. 1,3 miliar di tubuh Pemprov Riau yang dipimpin Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman pada APBD tahun 2015-2016 lalu. Sedangkan pada Tahun 2020, Sekda Riau Yan Prana Jaya, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Rp 1,8 miliar, diduga memotong 10% semua anggaran yang dicairkan di Bappeda Siak. Korupsi diduga terjadi pada 2014-2017. Yan saat itu merupakan Kepala Bappeda Siak. Dia baru menjabat sebagai Sekda Riau setelah dilantik oleh Gubernur Riau Syamsuar pada November 2019. Syamsuar sendiri merupakan Bupati Siak saat Yan menjadi Kepala Bappeda (Azazi, 2020).

Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan, Salah satunya yaitu: membuat zona integritas anti-korupsi, melakukan optimalisasi dan implementasi pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, melakukan bimbingan teknis integritas untuk semua pejabat eselon III dan IV, melakukan bimbingan teknis pengelolaan aplikasi *Monitoring Center For Prevention* (MCP) dan evaluasi tindak lanjut rencana aksi sektor sumber daya alam, mendorong penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk pencegahan dan penindakan korupsi, melakukan upaya penguatan lembaga masyarakat dalam pengawasan pencegahan, dan melakukan gerakan Riau Go IT yaitu: memberikan pelayanan terbaik berbasis teknologi informasi kepada masyarakat khususnya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan peran dan fungsi pemerintah, penyebarluasan informasi, dan pelayanan publik.

Secara teori, ada beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan. Salah satunya ialah budaya organisasi seperti budaya kejujuran, terbuka dan asistensi, serta menghilangkan kesempatan untuk berbuat curang (Taufik, 2010). Budaya organisasi adalah suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi (Rivai dan Mulyadi, 2012). Hal ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Arens (2014) Salah satu faktor yang bisa mencegah kecurangan adalah budaya organisasi dan etika yang tinggi. Begitu juga dengan pernyataan yang dikemukakan Tunggal (2011) bahwa budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi dapat mencegah kecurangan dalam suatu organisasi.

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah peran audit internal. Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara

memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut (Mulyadi, 2012).

Budaya organisasi dan sistem pengendalian internal perusahaan merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan diterapkannya pengendalian internal dalam suatu organisasi, maka akan ada pengawasan untuk mencapai visi, misi serta tujuan organisasi dengan sendirinya. Apabila pengendalian internal berjalan dengan efektif, maka dapat membantu perusahaan dalam melindungi aset perusahaan, menjamin ketersediaan laporan keuangan dan manajerial yang andal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di perusahaan, dan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan, pelanggaran yang berakibat pada kerugian perusahaan (Susanto, 2008). Pengendalian internal perusahaan tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya dukungan dari budaya organisasi yang baik karena perilaku tidak etis dalam perusahaan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan (Kusumastuti 2012). Dengan adanya budaya organisasi yang mempengaruhi setiap perilaku para anggota dalam organisasi, maka sistem pengendalian internal dapat berjalan tanpa hambatan. Hal tersebut terjadi karena keberhasilan perusahaan tidak akan tercapai apabila tidak ada campur tangan para anggota organisasi di dalamnya. Tujuan pengendalian internal dapat tercapai jika unsur-unsur pengendalian internal itu sendiri benar-benar dipenuhi dan agar pengendalian itu berjalan secara efektif dan efisien diperlukan suatu bagian tertentu yang mengawasi dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengendalian internal, bagian ini adalah audit internal. Pengaruh peran audit internal akan menjadi suatu hal yang menduduki posisi yang sangat penting karena dapat menunjang efektivitas pengendalian internal. Semakin tinggi yang diterapkan maka semakin baik pula sistem pengendalian internal (Agusiady, 2017). Dengan adanya peran audit internal yang baik maka akan meningkatkan pula efektivitas pengendalian internal. Hal tersebut karena audit internal dilakukan guna mengevaluasi kecukupan, efisiensi, efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan (Hery, 2013).

Tuanakotta (2014) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik dan aktif pengendalian internal yang diterapkan, maka dapat mencegah kecurangan terjadi. Pengendalian internal menurut Tuanakotta (2014) ialah proses, kebijakan, dan prosedur yang didesain manajemen guna memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Arens et al (2014) mengatakan bahwa pengendalian internal adalah satu proses yang dapat memberikan kepastian yang layak mengenai tercapainya tujuan manajemen dalam pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi di dalam suatu organisasi.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pasal 1 nomor 3 yang menyatakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Provinsi bertugas untuk melakukan pengawasan internal terhadap administrasi umum pemerintahan di daerah meliputi kebijakan, kelembagaan, pegawai, keuangan dan barang daerah. Inspektorat harus dapat memastikan tujuan dan sasaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dalam Pemerintahan Provinsi Riau telah dibuat dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan *Fraud Triangle Theory*, salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan adalah kesempatan atau peluang yang merupakan situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Kecurangan disebabkan oleh *internal control* yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit, dan sikap apatis (Tunggal, 2012). Apabila penerapan pengendalian internal telah dilakukan dengan baik dan benar termasuk di dalamnya memaksimalkan peran audit internal maka akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan sehingga kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat segera dicegah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran audit internal dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan melalui pengendalian internal.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah 40 (empat puluh) Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Riau, yang terdiri dari: 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 3 (tiga) Rumah Sakit, 9 (sembilan) Badan dan 24 (dua puluh empat) Dinas. Sampel dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang sudah diaudit di Pemerintah Provinsi Riau, Dari setiap OPD akan diambil 3 (tiga) responden, yaitu: (1) Kepala OPD selaku pengguna anggaran/barang dan sebagai pelaksana tugas, pokok dan fungsi OPD, (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD sebagai pejabat yang melakukan fungsi tata usaha keuangan, dan (3) Bendahara Pengeluaran OPD sebagai pelaksana tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada OPD. Sehingga responden berjumlah 105 (seratus lima) responden. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) yaitu

budaya organisasi dan peran audit internal, variabel dependen (Y) yaitu pencegahan kecurangan dan variabel intervening (Z) yaitu pengendalian internal. Alat analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan *Structural Equation Modelling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan menggunakan software SmartPLS versi 3.2.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Indikator	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Budaya Organisasi (X1)	1	5	4,42	0,727
Peran Audit Internal (X2)	1	5	4,49	0,664
Pencegahaan Kecurangan (Y1)	1	5	4,50	0,625
Pengendalian Internal (Y2)	1	5	4,54	0,653

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata hasil tanggapan responden dari variabel budaya organisasi, peran audit internal, pencegahan kecurangan, dan pengendalian internal tergolong sangat baik karena rata-rata di atas 4,20.

Hasil Uji Analisis *Partial Least Square*

Hasil Uji Model Pengukuran (*Outer Model*)

Terdapat kriteria didalam penggunaan teknik analisis data dengan SmartPLS untuk menilai *outer model* yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*.

Hasil Uji Validitas *Convergent*

Hasil uji validitas *convergent* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
Budaya Organisasi (X1)	0,615	Valid
Peran Audit Internal (X2)	0,569	Valid
Pencegahaan Kecurangan (Y1)	0,665	Valid
Pengendalian Internal (Y2)	0,576	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Tabel 2 diatas menjelaskan nilai AVE dari Budaya Organisasi (X1), Peran Audit Internal (X2), Pencegahaan kecurangan (Y1), dan Pengendalian Internal (Y2). Seperti yang tercantum didalam tabel dapat dilihat bahwa setiap konstruk (variabel) tersebut memiliki nilai AVE di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan konstruk tersebut sudah memenuhi kriteria valid.

Hasil Uji Validitas *Discriminant*

Berdasarkan pengujian dapat dijelaskan bahwa hubungan *discriminant validity* pada penelitian ini mempunyai hubungan yang sempurna karena memiliki koefisien korelasi di atas 0,7.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas diuraikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3 Nilai Cronbach's Alpha

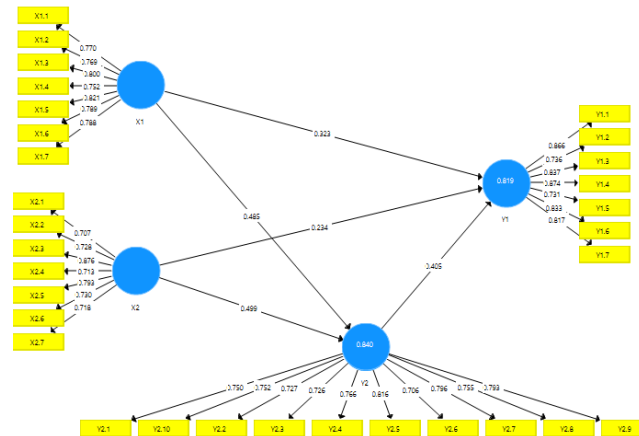
No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
1	Budaya Organisasi (X1),	0,896	0,918
2	Peran Audit Internal (X2)	0,872	0,902
3	Pencegahaan Kecurangan (Y1)	0,915	0,932
4	Pengendalian Internal (Y2)	0,918	0,931

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* masing-masing variabel besar dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pengukuran setiap variabel dalam penelitian ini memenuhi persyaratan validitas konvergen.

Hasil Uji Model Struktural (*Inner Model*)

Untuk model persamaan struktural (*structural equation model*) penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut



Sumber: Output Smart PLS 3.0 (2022)

Gambar 1 Full Model Struktural SEM-PLS

Model struktural dalam PLS digunakan untuk melihat *R-Square* untuk setiap variabel laten dependen. Tabel 4 merupakan hasil estimasi *R Square* dengan menggunakan SmartPLS.

Tabel 4 <i>R Square</i>	
	<i>R Square</i>
Y₁	0,819
Y₂	0,840

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Tabel 4 menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,819 yang berarti bahwa pada Pencegahan kecurangan(Y₁) penelitian ini 81,9 % di jelaskan oleh variabel Budaya Organisasi (X₁), Audit Internal (X₂) dan Pengendalian Internal(Y₂). Sedangkan sisanya sebesar 18,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Selanjutnya Pengendalian Internal(Y₂). menunjukkan nilai *R square* sebesar 0,840 atau 81,9 % di jelaskan oleh variabel Budaya Organisasi (X₁) dan Audit Internal (X₂)

Untuk mengevaluasi *model fit* dapat ditentukan oleh beberapa indikator *fit* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 Model Fit

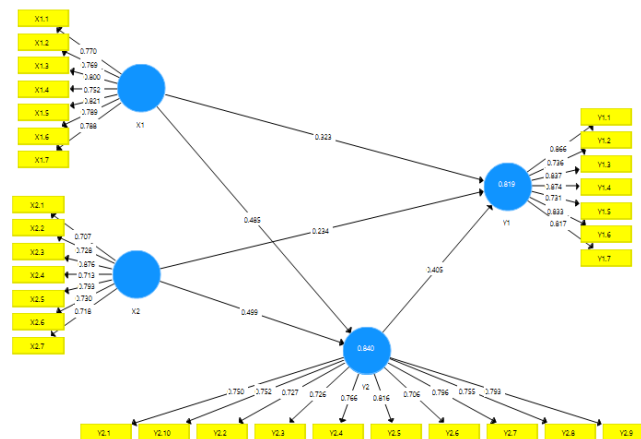
No.	Model Fit	Nilai	Kriteria	Keterangan
1	SRMR	0,080	< 0,1	Diterima
2	NFL	0,605	< 0,9	Diterima
3	rms Theta	0,163	< 0,16	Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Pada Tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai SRMR sebesar 0,080 < 0,1, NFL sebesar 0,605 < 0,9, dan nilai rms Theta sebesar 0,163 < 0,16. ini dapat diartikan bahwa model penelitian ini mempunyai model *fit* yang baik.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis SEM-PLS dapat dilihat pada *output result for inner weight* yang disajikan pada Gambar 2 dan Tabel 6 berikut ini.



Sumber: Output Smart PLS 3.0
Gambar 2 Hasil Proses Bootstrapping

Hasil result for inner weight dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Result For Inner Weight

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Value
X1 -> Y1	0,323	0,320	0,088	3,649	0,000
X1 -> Y2	0,485	0,485	0,115	4,220	0,000
X2 -> Y1	0,234	0,268	0,142	1,647	0,100
X2 -> Y2	0,499	0,492	0,111	4,511	0,000
Y2 -> Y1	0,405	0,369	0,138	2,945	0,003

Sumber: Output Smart PLS 3, 2022

Untuk hipotesis pengaruh tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 4.7 Berikut ini:

Tabel 7 Specific Indirect Effects

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Value
X1 -> Y2 -> Y1	0,196	0,183	0,083	2,359	0,019
X2 -> Y2 -> Y1	0,202	0,179	0,076	2,666	0,008

Sumber: Output Smart PLS 3, 2022

Pengujian hipotesis terhadap koefisien jalur antar variabel perlu untuk memperhatikan nilai *p value* dengan alpha lebih kecil dari 0,05. Berikut penjelasan dari hasil pengujian hipotesis dengan *bootstrapping* dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Tabel 6 memperlihatkan nilai *Path Coefisient* untuk budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangannya bernilai positif sebesar 0,323 dan nilai *p-value* sebesar 0,000. nilai *p-value* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_1 diterima, yaitu budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya organisasi maka semakin meningkat pengendalian internal pada organisasi.. Budaya organisasi yang diterapkan dalam organisasi yang baik akan mendorong pengendalian internal yang semakin baik. Budaya organisasi dan sistem pengendalian internal merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Menurut Cameron dan Quin (2006) yang menyatakan bahwa budaya organisasi menandakan prosedur dan keteraturan tugas, yang merupakan perhatian untuk membuat sebuah organisasi menjadi sukses dan unik. Mengingat pandangan ini, gagasan bahwa baik budaya organisasi maupun pengendalian internal menetapkan pedoman untuk perilaku dan tindakan pegawai yang ditujukan untuk mencapai keberhasilan organisasi yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nakiyaga & Anh (2017) yang menyimpulkan bahwa budaya organisasi mempengaruhi efektivitas pengendalian internal, artinya para pimpinan dan orientasi budaya organisasi yang baik memerankan peran penting dalam mengendalikan semua proses aktivitas dalam organisasi. Sehingga organisasi beroperasi secara efektif dan efisien dan dapat menyajikan pelaporan keuangan yang handal serta dapat mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya organisasi yang kuat yang dimiliki suatu organisasi dapat terwujud.

Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Tabel 6 memperlihatkan nilai *Path Coefisient* untuk peran audit internal terhadap pencegahan kecurangannya bernilai positif sebesar 0,234 dan nilai *p-value* sebesar 0,100. nilai *p-value* yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_2 ditolak, yaitu peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini mengindikasikan pada dasarnya audit internal telah melaksanakan fungsinya dengan baik namun pengaruh peran audit internal tersebut tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan secara signifikan dalam membantu manajemen mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi di dalam suatu organisasi.

Menurut Janiman dkk (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini disebabkan perilaku serakah bisa memicu seseorang melakukan kecurangan hal itu didasari dengan adanya kesempatan. Banyaknya risiko yang akan dihadapi perusahaan mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan (prevention) untuk menangkali terjadinya kecurangan. Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul.

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Audit internal harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi yang mana ia tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan dan bertanggungjawab kepada top manajemen. Internal audit juga harus memiliki sumber daya yang profesional, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi (Amrizal, 2004)

Tidak berpengaruhnya peran audit internal kemungkinan besar juga disebabkan karena audit internal pada pemerintah belum menjalankan fungsinya secara maksimal, menurut penelitian BR.Barus (2017). banyaknya kasus kecurangan di Indonesia ditimbulkan karena sistem deteksi & peran audit internal wilayah itu sendiri tidak berfungsi, misal badan pengawas daerah yang tidak berfungsi lantaran diisi oleh para pekerja yang menjelang pensiun.

Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap pengendalian internal. Tabel 6 memperlihatkan nilai *Path Coefisient* untuk budaya organisasi terhadap pengendalian internalnya bernilai positif sebesar 0,485 dan nilai *p-value* sebesar 0,000. nilai *p-value* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_3 diterima, yaitu budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian internal.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi budaya organisasi maka semakin meningkat pengendalian internal pada organisasi. Budaya organisasi yang diterapkan dalam organisasi yang baik akan mendorong pengendalian internal yang semakin baik. Budaya organisasi dan sistem pengendalian internal merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Menurut Cameron dan Quin (2006) yang menyatakan bahwa budaya organisasi menandakan prosedur dan keteraturan tugas, yang merupakan perhatian untuk membuat sebuah organisasi menjadi sukses dan unik. Mengingat pandangan ini, gagasan bahwa baik budaya organisasi maupun pengendalian internal menetapkan pedoman untuk perilaku dan tindakan pegawai yang ditujukan untuk mencapai keberhasilan organisasi yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nakiyaga & Anh (2017) yang menyimpulkan bahwa budaya organisasi mempengaruhi efektivitas pengendalian internal, artinya para pimpinan dan orientasi budaya organisasi yang baik memerankan peran penting dalam mengendalikan semua proses aktivitas dalam organisasi. Sehingga organisasi beroperasi secara efektif dan efisien dan dapat menyajikan pelaporan keuangan yang handal serta dapat mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya organisasi yang kuat yang dimiliki suatu organisasi dapat terwujud.

Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh peranaudit internal terhadap pengendalian internal. Tabel 6 memperlihatkan nilai *Path Coefisient* untuk pengaruh peran audit internal terhadap pengendalian internal yakni bernilai positif sebesar 0,499 dan nilai *p-value* sebesar 0,000. nilai *p-value* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_4 diterima, yaitu peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian internal.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran audit internal maka semakin meningkat pengendalian internal pada organisasi. Pengaruh peran internal audit akan menjadi suatu hal yang menduduki posisi yang sangat penting karena dapat menunjang efektivitas pengendalian internal.

Secara lebih spesifik, organisasi mengandalkan fungsi audit intern untuk membantu memastikan bahwa proses manajemen risiko, lingkup pengendalian secara keseluruhan dan efektivitas kinerja dari proses usaha telah konsisten dengan ekspektasi manajemen. Fungsi peran audit internal saat ini tidak sekedar dituntut menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan memberikan usulan perbaikan. Peran Audit internal terlibat dan berperan aktif memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian, peran audit internal tidak hanya sebagai “detector” namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya good governance.

Pengujian Hipotesis 5

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Tabel 6 memperlihatkan nilai *Path Coefisient* untuk pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan yakni bernilai positif sebesar 0,405 dan nilai *p-value* sebesar 0,003. nilai *p-value* yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_5 diterima, yaitu pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu organisasi memerlukan suatu pemahaman mengenai pengendalian internal yang akan diterapkan didalam organisasi. Dimana jika hal ini diterapkan secara efektif maka dapat mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini juga di jelaskan oleh Cuomo (2007), bahwa dengan di terapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit ataupun non profit dapat melindungi asset perusahaan dari kecurangan dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya.

Dalam pemerintahan sendiri telah diterapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu sistem pengendalian internal yang dibuat secara menyeluruh pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengendalian internal yang efektif dan efisiensi secara tidak langsung dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tindakan kecurangan, penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan akan semakin kecil.

Pengujian Hipotesis 6

Hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan melalui pengendalian internal. Berdasarkan hasil pengujian Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa *path coefisient* sebesar 0,196 dan nilai *p value* $0,019 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan secara tidak langsung melalui pengendalian internal. hal ini berarti Hipotesis 6 diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan secara tidak langsung melalui pengendalian internal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tindakan pencegahan kecurangan dapat diterapkan melalui budaya kerja yang dikembangkan dengan baik melalui pengendalian internal yaitu dengan menerapkan tata kelola yang baik. dengan mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Good Government, maka akan meningkatkan budaya yang jujur sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan, yang mana GC itu sendiri akan tercapai dengan adanya pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu, pengendalian internal dapat memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.

Pernyataan Arens diperkuat oleh Tunggal (Suastawan et al, 2017) menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dimana seluruh elemen organisasi bertanggung jawab untuk menerapkan budaya yang baik agar risiko kecurangan bisa diminimalkan.

Pengujian Hipotesis 7

Hipotesis ketujuh yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan melalui pengendalian internal. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa *path coefisient* sebesar 0,202 dan nilai *p value* $0,008 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa peran

audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan secara tidak langsung melalui pengendalian internal. hal ini berarti Hipotesis 7 diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan secara tidak langsung melalui pengendalian internal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pencegahan kecurangan dapat ditingkatkan dengan peran audit internal yang didukung dengan penerapan pengendalian internal yang efektif.

Setiap organisasi memerlukan suatu pemahaman mengenai pengendalian internal yang akan diterapkan di dalam organisasinya. Dimana jika hal ini diterapkan secara efektif maka dapat mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini juga di jelaskan oleh Cuomo (2007), bahwa dengan di terapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit ataupun non profit dapat melindungi asset perusahaan dari kecurangandan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya

Auditor internal berfungsi untuk mengukur keefektifan dari pengendalian internal organisasi/instansi dan untuk melaporkan pada manajemen dimana dan bagaimana pengendalian bisa diperkuat. Perry and Bryan (1997) berpendapat bahwa internal audit memainkan peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan dalam suatu organisasi dengan memastikan bahwa audit direncanakan dengan baik dan bahwa program internal audit yang tepat ada.

PENUTUP

Budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, peran audit internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, budaya organisasi berpengaruh terhadap pengendalian internal, peran audit internal berpengaruh terhadap pengendalian internal, pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui pengendalian internal, dan peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui pengendalian internal.

DAFTAR RUJUKAN

- Agusiady, R. (2017). Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Kas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 9–30.
- Amrizal, Ak, MM, CFE. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor. Jakarta
- Azazi, H. (2020). "Sekda Riau diduga Korupsi Rp, 1,8 M Saat Jabat Kepala Bappeda Siak" Diakses pada 23 Desember 2020, dari <https://news.detik.com/berita/d-5306617/sekda-riau-diduga-korupsi-rp-18-m-saat-jabat-kepala-bappeda-siak>
- Barus, E. L. (2017). *Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Pt.Indonesia Aluminium Asahan (Persero) Kuala Tanjung*. 1–56.
- Cuomo, A. M. 2007. Internal Controls and Financial Accountability for Not--for—Profit Boards
- Fitrawansyah. (2014). *Fraud dan Auditing*. Edisi Pertama. Jakrata: Mitra Wacana Media.
- Janiman, Mulyatno, R., Sukmaningrum, T, I., (2022) Pengaruh Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan Penyalahgunaan Aset, *Syntax Idea*, 4(3), <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i3.1815>
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Kusumastuti, Nur Ratri. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Nakiyaga, B., & Anh, D. T. L. (2017). How Organisational Culture Affects Internal Control Effectiveness: The Role Played By Top Case study : Uganda Revenue Authority. *Business Administration Master's Thesis*, 1–52.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Suyatmiko, Wawan (2020). Ranking Indeks korupsi indonesia merosot, urutan 102 dari 180. Diakses pada 20 Januari 2021, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>
- Tuanakotta, T. M. (2011). *Berpikir Kritis Dalam Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, A.W, (2012) *Audit kecurangan dan akuntansi forensik*,. Jakarta: .Harvarindo,
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). ANALISIS WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>